

POLITIK DAN DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA HINGGA MASA REFORMASI

Maimuna Ritonga

Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, e-mail: maimuna.rit95@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mencoba mengkaji dinamika perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum sebagai bagian penting dalam pendidikan memiliki posisi strategis dalam pendidikan. Hitam putihnya kualitas pendidikan sesungguhnya sangat ditentukan oleh eksistensi kurikulum tersebut. Selain itu, kurikulum harus memperhatikan unsur-unsur peserta didik, pendidikan, masyarakat, dan peran pengembang kurikulum terutama guru. Peserta didik sebagai objek kurikulum harus mendapat prioritas utama dalam pengembangan kurikulum. Indonesia sering mengalami perubahan kurikulum, termasuk kurikulum pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Pendidikan masa depan perlu dirancang untuk menjawab harapan dan tantangan perubahan yang terjadi, Sistem pendidikan perlu dibangun terus menerus dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kurikulum diperlukan setiap saat karena kurikulum akan selalu merespon perkembangan kehidupan, baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, dan perkembangan politik.

Kata Kunci: dinamika, pengembangan, kurikulum, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial (*social agent of change*). Oleh karena itu, pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan secara nasional. Tujuan pendidikan nasional diharapkan dapat melahirkan manusia Indonesia yang religius dan bermoral, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut hal yang perlu dikembangkan adalah menyangkut kurikulum pendidikan karena salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dunia pendidikan nasional di masa depan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum di masa depan perlu dirancang dan

disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Terkait dengan relevansi kurikulum dengan mempersiapkan siswa menghadapi dunia globalisasi, maka kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan IPTEK dan IMTAK terutama menyangkut penyiapan dasar keterampilan, kecerdasan, dan kreativitas serta kepribadian (Sulthon, 2014: 44-45).

Indonesia sendiri telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan MANIPOL-USDEK (Muhammedi, 2016:49). Berangkat dari bahasan diatas penulis mencoba memaparkan tentang "Politik dan Dinamika Kebijakan

Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi” sehingga dapat ditarik suatu pemahaman bersama dengan adanya pembahasan ini.

Pengembangan Kurikulum

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai *circle of intruction* yaitu suatu lingkungan pengajaran dimana guru dan murid terlibat didalamnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka mencapai pendidikan (Syafaruddin, dkk, 2012:104).

Menurut Imam Machalidan Ara Hidayat, (2016: 422) kurikulum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dijelaskan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Jadi istilah kurikulum sebenarnya mempunyai pengertian yang cukup beragam mulai dari pengertian sempit hingga yang sangat luas, penulis menyimpulkan bahwa

kurikulum adalah rencana awal yang dibuat untuk membimbing anak belajar disekolah, yang disusun berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dan dapat di aktualisasikan di dalam pembelajaran. Kurikulum memberikan petunjuk yang cukup rinci mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Pengembangan kurikulum atau disebut dengan *curriculum development* pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal (Sukiman, 2015: 5). Jadi pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial, dari kurikulum tersebut dengan harapan untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan.

Menurut Subiyantoro, dkk (2015: 4-5) pembaharuan kurikulum sangat penting untuk diadakan karena kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan terus berlangsung. Pengembangan kurikulum umumnya dimulai dari perubahan konsepsional yang mendasar kemudian perubahan struktural. Pengembangan disebut sebagian jika hanya terjadi pada komponen tertentu, contohnya pada tujuan, isi, metode, atau sistem penilaiannya. Pengembangan dikatakan menyeluruh jika mencakup perubahan semua komponen kurikulum.

Subiyantoro, dkk (2015: 6) jugamengemukakanbahwapengembangan struktural kurikulum yang menyangkut komponen kurikulum yakni:

a. Perubahan dalam tujuan

Perubahan ini didasarkan kepada pandangan hidup dimasyarakat serta falsafah bangsa. Tanpa tujuan yang jelas, tidak akan membawa perubahan yang berarti, dan tidak ada petuntukkemana pendidikan diarahkan.

b. Perubahan isi dan struktur

Perubahan ini meliputi struktur mata pelajaran yang diberikan kepada siswa termasuk isi dari setiap mata pelajaran. Pengembangan ini dapat menyangkut aktivitas belajar anak, pengalaman yang harus diberikan pada anak, juga pendekatan dari mata pelajaran-mata pelajaran tersebut. Diadakan pendekatan interdisipliner atau dilihat proporsinya masing-masing. Misalnya mana yang termasuk pendidikan umum, pendidikan keahlian, pendidikan akademik dan lain-lain.

c. Perubahan strategi dan sarana kurikulum

Perubahan ini menyangkut strategi pelaksanaan kurikulum itu sendiri yang meliputi perubahan teori belajar mengajar, perubahan sistem administrasi, bimbingan dan penyuluhan, perubahan sistem penilaianbelajar. Kemudian menyangkut sarana ketenagaan baik dari segi kualitas dan kuantitas, juga sarana material berupa perlengkapan sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga dan lain-lain.

d. Perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum

Perubahan ini menyangkut metode atau cara yang paling tepat untuk mengukur atau menilai sejauh mana kurikulum berjalan efektif dan efisien, relevan dan produktivitas terhadap program pembelajaran sebagai suatu sistem dari kurikulum.

Saat ini proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti kebijakan yang diundangkan dalam UU No. 20 tahun 2003, PP No, 19 tahun 2005 dan Permendiknas No. 22, 23, dan 24. Berdasarkan ketetapan tersebut maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti dua langkah besar yaitu proses pengembangan kurikulum yang dilakukan di Pemerintah Pusat dan pengembangan yang dilakukan disetiap satuan pendidikan. Sebelumnya telah diberlakukan beberapa masa kurikulum seperti kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut sebagai implementasi dari hasrat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) tahun 2003.

Sejak tahun 1945 hingga tahun 2013 telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 10 kali yaitu pada tahun 1947 (Rencana Pelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai), tahun 1964 (Rencana Pendidikan Sekolah Dasar), tahun 1968 (Kurikulum Sekolah Dasar), tahun 1973 (Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pengembangan (PPSP)), tahun 1975 (Kurikulum Sekolah Dasar), tahun 1984 (Kurikulum 1984), tahun 1997 (Revisi Kurikulum 1984), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi(KBK)), tahun 2006

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)), (Loeziana Uce, 2016: 218).

Tahap tahap perubahan kurikulum, menuntut adanya pengembangan kurikulum mengikuti perkembangan zaman. Begitu halnya dengan kurikulum 2013, kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dalam rangka merespon berbagai tantangan yang dihadapi baik internal dan eksternal (Imam Machali & Ara Hidayat, 2016 :423). Menurut Muhammad Zaini (2009: 167-168) faktor lain yang menjadi penyebab dilakukannya perubahan kurikulum antara lain: *pertama*, adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, sehingga praktek pendidikan harus mendapat perhatian serius, agar negara kita tidak ketinggalan zaman dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedua, berkembangnya industri dan teknologi, hal ini harus disikapi dengan cermat oleh tim pengembang kurikulum, agar melahirkan manusia-manusia yang siap pakai disegala bidang. *Ketiga*, orientasi politik atau praktek kenegaraan dan pandangan intelektual yang berubah. *Keempat*, pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar dan perubahan dalam masyarakat, sehingga banyak teori baru yang muncul dalam proses pembelajaran seperti *active learning*. *Kelima*, eksploitasi ilmu pengetahuan. Banyaknya disiplin ilmu yang muncul, sehingga kurikulum paling tidak harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, agar anak didik memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan dimasa depan (Muhammad Zaini 2009: 169-170).

Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Imam Machali dan Ara Hidayat (2016: 424) mengemukakan bahwa dinamika pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dapat di tuntut sejak prakemerdekaan dimana pada masa ini sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas. Selanjutnya, perkembangan dan perubahan kurikulum pendidikan berlanjut pada masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan akibat dari adanya perubahan sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara cepat, cermat, dan cerdas harus direspon.

Pengembangan dan perubahan kurikulum tersebut memang harus dilakukan karena kurikulum bukanlah sebuah konsep statis, akan tetapi dinamis dan harus terus menyesuaikan berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi sebagaimana prinsip kurikulum yaitu berubah dan proses terus menerus (*change and continuity*). Berikut ini adalah gambaran dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia.

1. Kurikulum Pendidikan Pra-kemerdekaan

Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh klonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah, dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam

pengembangan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan.

Terdapat dua model pendidikan pada masa kolonial ini, yaitu *pertama*, sekolah kelas dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan tiga tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, dan membaca. *Kedua*, sekolah kelas satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya empat tahun, kemudian lima tahun dan terakhir tujuh tahun. Kurikulum yang diajarkan, meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat.

Pada jenjang pendidikan menengah didirikan *gymnasium* yang siswanya hanya golongan ningrat. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama tiga tahun. Mata pelajaran yang diajarkan, meliputi Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Ilmu Hitung, Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam atau Kimia, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah dan Tata Buku. Kemudian model pendidikan *gymnasium* berubah menjadi MULO (*Meer Uifgebried Order Wijs*) yang lama pendidikannya empat tahun.

Adapun untuk jenjang atau tingkatan atas, Belanda mendirikan AMS (*Algemene Midelbare School*). Lama pendidikan ini berlangsung selama tiga tahun yang terbagi pada bagian A dan B. Bagian A spesifikasinya adalah Ilmu Kebudayaan yaitu kesastraan timur dan kesastraan klasik Barat. Adapun

bagian B klasifikasinya adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam.

Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, maka pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Pendidikan tingkat rendah, Jepang menggantinya dengan sebutan *Kokumin Gako* dengan lama pendidikan enam tahun. Kurikulum pendidikan ini lebih menitikberatkan pada olah raga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang (Imam Machali & Ara Hidayat 2016: 424-425).

2. Kurikulum Pendidikan Pasca-kemerdekaan

Rencana Pelajaran 1947

Istilah kurikulum menjadi populer sejak tahun 1950 di Indonesia, yang mana dikenalkan oleh sejumlah kalangan pendidik lulusan Amerika Serikat. Sebelum mengenal istilah kurikulum, pendidikan Indonesia lebih akrab dengan istilah rencana pembelajaran. Kurikulum sendiri mempunyai definisi yang berbeda-beda hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan latar belakang keilmuan para ahli tersebut, sehingga semantik definisi yang dirumuskan akan berbeda meskipun pada intinya terkandung maksud yang sama (M. Asri, 2017: 194).

Kurikulum yang pertama lahir setelah Indonesia merdeka disebut rencana pelajaran atau dalam bahasa Belanda *ler plan*. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional. Rencana Pelajaran 1947

merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dengan mengurangi pendidikan kecerdasan intelektual (Sholeh Hidayat, 2013: 2).

Kurikulum pada tahun ini masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang sehingga hanya meneruskan kurikulum yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Belanda. Bentuk Rencana Pelajaran tahun 1947 memuat dua hal pokok yaitu:

1. Daftar Mata Pelajaran dan Jam Pengajarannya
2. Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)

Rencana pelajaran 1947 mengurangi pendidikan intelektual, namun diutamakan pendidikan watak atau perilaku (*value, attitude*) meliputi:

- a. Kesadaran bernegara dan bermasyarakat
- b. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari
- c. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani (Leo Agung,, 2015: 23).

Mata Pelajaran pada kurikulum tahun 1947 untuk tingkat Sekolah Rakyat (SR) ada 16 bidang studi, Sekolah Menengah (SMP) ada 17 bidang studi, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan B ada 19 bidang studi. Menteri Pendidikan dan Pengajaran ketika itu ialah Mr. Soewandi (Anzar Abdullah, 2007: 345). Penerapan Rencana Pelajaran 1947 memuat ketentuan yaitu:

pertama, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. *Kedua*, jumlah mata pelajaran untuk Sekolah Rakyat (SR) 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi, SMA jurusan B 19 bidang studi. *Ketiga*, Akhirnya Rencana Pelajaran 1947 diawali dari pembenahan sistem per sekolah pascaindonesia merdeka yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Leo Agung,, 2015: 25).

Rencana Pelajaran Terurai 1952

Rencana pelajaran terurai ini merupakan respons dan hasil penyesuaian dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih diperincikan. Namun peserta didik masih diposisikan sebagai objek, karena guru menjadi subjek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuan (Imam Machali & Ara Hidayat, 2016: 425).

Sistem penilaian berdasarkan kurikulum 1952 hampir sama dengan kurikulum 1947, yakni dilakukan melalui ulangan harian, ulangan umum catur wulan, dan ujian penghabisan. Ulangan harian dan ulangan umum catur wulan dipakai sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang siswa naik atau tinggal kelas. Apabila seorang siswa belum mencapai minimal nilai 6 dalam ulangan umum catur wulan, yang bersangkutan mengikuti ulangan perbaikan (*her*). Ujian

penghabisan yang kemudian diubah namanya menjadi Ujian Negara dilakukan sekitar tahun 1958, digunakan untuk menentukan kelulusan (Leo Agung,, 2015: 29).

Kurikulum 1964

Penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana.

Pokus kurikulum 1964 ini pada pengembangan Pancawardhana, yaitu: Daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajara diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik,keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan Dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis (Sholeh Hidayat, 2013: 3-4).

Kurikulum 1968

Lahirnya Kurikulum 1968 sebagai perubahan dari Kurikulum 1964 dipengaruhi oleh sistem politik dari pemerintahan rezim Orde Lama ke rezim pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 menggantikan rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 melakukan perubahan struktur kurikulum dari

Pancawardhana dan menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran menjadi kelompok pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah jam pelajarannya 9 mata pelajaran.

Titik berat kurikulum ini pada materi apa saja yang tepat diberikan pada siswa di setiap jenjang pendidikan. Segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat (Sholeh Hidayat, 2013: 4).

Kurikulum 1975

Setelah kurikulum 1968 berjalan selama kurang lebih 6 tahun, kurikulum tersebut perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman dan masyarakat. Program-program, kebijakan-kebijakan, dan fenomena yang telah memengaruhi dan melahirkan perubahan-perubahan pada kurikulum 1975(Leo Agung, 2015: 35).

Kurikulum 1968 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung.

Setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini, semua

proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap (Imam Machali & Ara Hidayat, 2016: 426). Sistem penilaian pada kurikulum ini adalah penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang sangat membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja (Sholeh Hidayat, 2013: 7).

Kurikulum 1984

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, menjelang tahun 1983 kurikulum 1975 dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga pada tahun 1984 dibentuklah kurikulum yang baru yaitu kurikulum 1984. Ciri kusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering kita sebut dengan CBSA. Materi pelajaran juga diberikan dengan konsep spiral yang artinya semakin tinggi kelas atau jenjangnya semakin dalam dan luas pula materi pelajarannya.

Selain itu metode penyampain materi tidak hanya sekedar ceramah, metode praktik juga sudah mulai digunakan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pelajaran. Dalam penyusunan kurikulum 1984 ini terdapat pula kebijakan yang diambil oleh pemerintah diantaranya penambahan mata pelajran inti yang awalnya hanya berjumlah 8 menjadi 16 mata pelajaran inti ditambah

lagi penambahan pelajaranpilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing.

Hal ini berkaitan dengan perubahan yang dilakukan pada program jurusan di SMA. Jika pada kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan yaitu IPA, IPS,dan Bahasa maka pada kurikulum 1984 ini jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari: (1) A1, penekanan pada mata pelajaran Fisika; (2) A2, penekanan pada mata pelajaran Biologi; (3) A3, penekanan pada mata pelajaran Ekonomi; (4) A4, penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan Budaya.

Sedangkan program B adalah program yang mengarah kepada keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjunkan siswa langsung berkecimpung di masyarakat. Tetapi mengingat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup maka program ini untuk sementara ditiadakan(M. Asri, 2017: 197-198).

Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri. Sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter anak yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill yang baik sehingga bisa digunakan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik atau lebih tepatnya, pendidikan bertujuan untuk memproduksi tenaga berpendidikan yang siap pakai.

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pelaksanaan kurikulum 1994, muncul beberapa persoalan yang dihadapisehingga mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut (M. Asri, 2017: 198).

Kurikulum 2004 (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian dikenal dengan Kurikulum 2004, merupakan suatu model kurikulum yang berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi yang mengatur pemerintah pusat dan daerah. Pemberlakuan KBK adalah suatu bentuk inovasi kurikulum. Juga kemunculan KBK seiring dengan munculnya semangat reformasi pendidikan.

Diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah diantaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi serta lahirnya Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang Arah Kebijakan Pendidikan di Masa Depan.

Intinya bahwa KBK menggantikan Kurikulum 1994, yang mana lebih menekankan pada keleluasaan dalam aktivitas belajar mengajar. Peserta didik menjadi pusat perhatian dalam proses belajar mengajar, kemampuan anak menjadi pertimbangan

pertama guru untuk melakukan sesuatu di kelas. Guru lebih berperan sebagai pendamping, fasilitator dan rekan yang mengajak murid untuk melakukan eksplorasi belajar.

KBK adalah kurikulum pendidikan yang berubah-ubah dan jadi “kebingungan” tersendiri bagi pendidik maupun peserta didik. Dengan KBK peserta didik seakan-akan menjadi kelinci percobaan Pemerintah untuk menemukan kurikulum mana pengaruhnya lebih besar terhadap mutu pendidikan. Jadi tidak heran jika Pemerintah melakukan kebijakan belum genap satu tahun kurikulum, sudah diusulkan untuk diganti dengan kurikulum yang lain.

KBK tidak terlalu lama pemberlakuannya dan belum sepenuhnya diterapkan di sekolah-sekolah terutama di daerah-daerah pedalaman, perbatasan, dan pantai, bahkan ada sekolah yang belum sempat dilaksanakan sosialisasi tentang KBK, kemudian oleh Pemerintah diganti lagi dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Rustam Abong, 2015: 40-41).

Kurikulum 2006 (KTSP)

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1 ayat 15) dikemukakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

KTSP resmi diberlakukan secara nasional dengan terbitnya PP No. 19/2005 dan Permendiknas No. 24/2006. Pengembangan KTSP berpedoman pada standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), standar isi (SI), dan standar kompetensi lulusan (SKL), yang digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah dengan menekankan pencapaian kemampuan minimal pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan pendidikan (Laelatul Istiqomah, 2016: 44).

Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Ahmadi adalah sebagai berikut: *Pertama*, Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa peserta didik adalah sentral proses pendidikan agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta warga negara yang demokratis sehingga perlu disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan siswa.

Kedua, Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. *Ketiga*, Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni berkembang secara dinamis. Relevan dengan kebutuhan.

Keempat, Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. *Kelima*, Belajar sepanjang hayat, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat (Muhammedi, 2016: 58-59).

Beberapa permasalahan yang mengacu pada kurikulum 2006 diantaranya: Konten kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui perkembangan usia anak. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum.

Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi. Standar proses pembelajaran belum

menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragan dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.

Standar penilaian belum secara maksimal mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berskala (Sholeh Hidayat, 2013: 120-121).

Kurikulum 2013

Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan menguatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Imam Machali & Ara Hidayat, 2016: 429).

Imam Machali dan Ara Hidayat (2016: 432-433) juga mengemukakan bahwa perubahan kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari

kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KTSP tahun 2006 yang kajian implementasinya dijumpai beberapa masalah. Kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang dihasilkan.

Atas dasar tersebut, penyempurnaan dan implementasi kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Kurikulum 2013 memerankan fungsi penyesuaian yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang terus berubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dalam implementasinya terangkup dalam KI-1 (Sikap Spiritual), KI-2 (Sikap Sosial), KI-3 (Pengetahuan), KI-4 (Keterampilan).

Sedangkan menurut Sholeh Hidayat, (2013: 121) faktor lain yang menjadi alasan pengembangan Kurikulum 2013 adalah: *pertama*, tantangan masa depan diantaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi, kebangkitan industri keratif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, mutu, investasi. *Kedua*, kompetensi masa depan yang meliputi kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral, kemampuan

menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda.

Ketiga, fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial (*social unrest*). *Keempat*, persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan kurang pemuatan karakter.

Menurut Imam Machali dan Ara Hidayat (2016: 429) dinamika perubahan kurikulum di Indonesia mulaidari Pra-Kemerdekaan, Pasca-Kemerdekaan, sampai dengan masa Reformasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, diperlukan adanya penyempurnaan pola dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi (Imam Machali, 2014: 83-84). Tantangan internal lainnya adalah terkait faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif 15-64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun keatas. Jumlah usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Sumber Daya

Manusia Indonesia usia produktif akan melimpah (Imam Machali, 2014: 84).

SDM yang melimpah ini apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tentunya akan menjadi beban pembangunan. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain berkenaan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan dimasa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena yang mengemuka. Tantangan masa depan terkait arus globalisasi dan berbagai isu terkait lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan ditingkat internasional. Di era globalisasi juga akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Dunia akan semakin transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas. Hubungan komunikasi, informasi, dan transformasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat sebagai akibat dari revolusi dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arus globalisasi juga akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat

industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di WTO, ASEAN Community, APEC, dan AFTA. Tantangan masa depan juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoains serta mutu, investasi, dan transformasi pada dunia pendidikan. Keikutsertaan Indonesia dalam Studi Internasional dan PISA (Program for International Student Assessment), Indonesia hanya menduduki peringkat empat besar dari bawah. Penyebab capaian ini adalah materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia (Imam Machali, 2014: 85).

Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, menjadi warga Negara yang bertanggung jawab, kemampuan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Disamping itu, generasi Indonesia harus memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai bakat/minatnya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Tantangan eksternal lainnya berupa fenomena disharmoni yang mengemuka terkait masalah perkelahian pelajar, masalah narkoba, korupsi, kecurangan dalam ujian, dan gejolak sosial di masyarakat (*social unrest*), (Imam Machali, 2014: 85-86).

Semakin maju pendidikan suatu negara, semakin maju negara tersebut. Pembuatan keputusan yang berhubungan dengan

pengembangan kurikulum merupakan proses kebijakan yang di dalamnya terdapat tanggung jawab sebagai pihak yang berkepentingan dengan masalah pendidikan secara legal. Kadang juga ditemukan sikap pro dan kontra, yakni sikap menerima dan menolak terhadap hasil keputusan kurikulum. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap hasil keputusan kurikulum dan fungsi sekolah.

Adanya pandangan untuk menerima dan menolak atas hasil keputusan kurikulum terletak pada pandangan pembuat keputusan kurikulum terhadap fungsi dan tujuan sekolah. Misalnya, apakah sekolah diselenggarakan dengan fungsi pengembangan pertumbuhan moral-religius peserta didik, menyampaikan mata pelajaran (*transfer of knowledge*), atau dalam rangka menyiapkan anak didik untuk kehidupan di masyarakat (Abdullah Idi, 2010: 228).

METODE

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen), (Nana Syaodih, 2009: 52). *Dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dalam bentuk kajianteoritis terhadap suatu kebijakan atas fenomena yang ada.* Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode

dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Karena bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber datanya adalah berupa jurnal, buku, artikel, dan lainnya yang membahas mengenai dinamikakebijakanperubahankurikulum di Indonesia.

KESIMPULAN

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan. Menyusun dan merumuskan kurikulum memang bukan suatu perkara yang mudah. Terlebih lagi kurikulum adalah suatu konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada pada zaman dimana kurikulum diterapkan, sedangkan jelas perubahan tidak mampu dihindari. Pengembangan kurikulum memang sangat dibutuhkan, mengingat agar pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun perlu diingat kembalibahwa tujuan pendidikan tidak akan terwujud hanya dengan baik pada satu aspek kurikulum saja. Beberapa aspek yang mendukung juga harus diperhatikan seperti kualitas para pengajar, sarana belajar-mengajar dan lain-lain. Namun jika kita lihat kembali pergantian kurikulum di Indonesia yang dapat dibbilang cukup intens membuat munculnya suatu anggapan bahwa setiap ganti penguasa ganti

pulakurikulumnya mengikuti kehendak para penguasanya.

Sehingga belum juga satukurikulum dilaksanakan sepenuhnya sudah berganti lagi dengan kurikulum baru. Dandisadari atau tidak yang menjadi korban adalah para pelaku kurikulum sendiri yaitupendidik dan para peserta didik. Sehingga dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum tersebut, besarharapan agar kurikulum dapat tersusun dengan sedemikian cermatnya sehinggamampu memprediksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat beberapa tahunkedepannya untuk menghindari terjadi bongkar pasang kurikulum. Dalam pelaksanaannya diharapkan pula kontrol yang berkelanjutan sehingga dalam perjalanan kurikulum bisa sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar. "Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah: Suatu Tinjauan Kritis Filosofis". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. No. 65, 2007
- Abong, Rustam. "Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia". *AT-TURATS*, Vol. 9. No. 2, 2015.
- Agung, Leo. *Sejarah Kurikulum Sekolah Menengah di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Asri, M. "Dinamika Kurikulum di Indonesia". *MODELING*. Vol. 4. No. 2, 2017.
- Hidayat, Sholeh. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA 2013.
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Evaluasi dan Inovasi. Yogyakarta:
TERAS, 2009.

Istiqomah, Laelatul. "Dinamika Perubahan Kurikulum: Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 Paud". *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*. Vol 1. No. 1, 2016.

Machali, Imam. & Ara Hidayat. *The Handbook Of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

"Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. III, No. 1, 2014.

Muhammedi. "Perubahan Kurikulum di Indonesia: Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal". *Raudhah*. Vol. IV. No. 1, 2016.

Subiyantoro, dkk. *Pengembangan Kurikulum: Suatu Kajian Teori dan Praktik Pada Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2015.

Sukiman. *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Sulthon. "Dinamika Pengembangan Kurikulum Ditinjau dari Dimensi Politisasi Pendidikan dan Ekonomi". *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. vol. 9. No. 1, 2014.

Syafaruddin, dkk. *Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing, 2012.

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Uce, Loeziana. "Realitas Aktual Praktis Kurikulum: Analisis terhadap KBK, KTSP dan Kurikulum 2013". *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Vol. 16. No. 2, 2016.

Zaini, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi*